

PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi pada Gerakan Desa Membangun)

Muhammad Badri

*Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau
Jl. HR Soebrantas Km 15 Simpangbaru, Tampan, Pekanbaru 28293
Email: muhammad.badri@uin-suska.ac.id*

Abstrak

Pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi media hibrida terbukti mempermudah desa-desa inovatif membangun jejaring dan memberdayakan komunitasnya guna mempersempit kesenjangan TIK, salah satunya adalah melalui Gerakan Desa Membangun (GDM). Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui profil dan program Gerakan Desa Membangun (GDM); (2) Mengetahui paradigma pembangunan pedesaan berbasis TIK yang dijalankan GDM; (3) Mengetahui masalah dan strategi pengembangan TIK di pedesaan; (4) Mengetahui pengembangan media komunikasi pedesaan berbasis TIK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis konten website GDM (<http://desamembangun.or.id/>) dan konten website desa berbasis desa.id yang berafiliasi dan dikembangkan oleh GDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) GDM lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung top down dengan program pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi tepat guna serta perlindungan warga desa; (2) Paradigma pembangunan pedesaan yang dijalankan GDM berbasis TIK dengan mengoptimalkan aplikasi sistem informasi desa dan internet pedesaan; (3) Permasalahan pengembangan TIK berkaitan dengan rendahnya infrastruktur TIK di pedesaan dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan yang diselesaikan dengan strategi pelatihan dan pendampingan; (4) Media komunikasi pedesaan yang dikembangkan adalah website desa dengan domain desa.id, pengembangan aplikasi open source, dan interkoneksi desa.

Kata kunci: *Komunikasi pembangunan, TIK pedesaan, Gerakan Desa Membangun*

1. Pendahuluan

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Proses pembangunan pedesaan kemudian semakin mengurangi

ketergantungan pada peran pemerintah, sebab masyarakat pedesaan semakin berdaya dan kreatif dalam mengembangkan inovasi.

Menurut Adisasmita (2006) pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Dimana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan meliputi: transparans, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas, dan berkelanjutan.

Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses pembangunan. Setiap pembangunan menawarkan perubahan, yang dampaknya terhadap satu wilayah dengan wilayah lainnya boleh jadi akan berlainan, karena karakteristik suatu wilayah dengan wilayah lain berlainan (Sitompul, 2009).

Pelaksanaan pembangunan pedesaan di era digital ini memerlukan sistem komunikasi konvergen melibatkan komunikasi interpersonal, media massa dan media hibrida (istilah lain untuk internet). Tujuannya agar banyak pihak dari berbagai generasi dapat terlibat dan berpartisipasi untuk mempercepat tujuan pembangunan. Sebab proses pembangunan tidak bisa mengabaikan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Komunikasi pembangunan pada dasarnya merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara yang sedang berkembang, terutama komunikasi untuk perubahan sosial yang terencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan (Harun & Ardianto, 2011).

Berdasarkan falsafahnya, studi komunikasi pembangunan diilhami oleh usaha pembebasan dan pencerahan pembangunan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan menanamkan jiwa kemandirian masyarakat. Sehingga apa pun bentuk dan jenisnya, aktivitas pembangunan senantiasa mengarah pada pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh (Dilla, 2007).

Hedebro dalam Harun & Ardianto (2011) mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan, yaitu:

1. Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Di sini politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah yang mneyangkut struktur organisasional dan kepemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi ini digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum.
2. Pendekatan yang lebih spesifik memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional. Menurut pendekatan ini, media massa sebagai pendidik atau guru, dan idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada masyarakat berbagai keterampilan, dan dalam kondisi tertentu memengaruhi sikap mental dan perilaku mereka. Persoalan utama pendekatan ini, bagaimana media dapat dipakai secara efisien untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa.
3. Pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Pendekatan ini berkonsentrasi pada bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai dalam menyebarkan ide-ide, produk dan cara-cara baru di suatu desa atau wilayah.

Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu strategi yang menekankan pada perlunya penyebaran informasi pembangunan kepada khalayak dengan prinsip pemberdayaan untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya rangka meningkatkan harkat, martabat dan menanamkan jiwa kemandirian masyarakat.

Dari kesimpulan itu dapat ditarik benang merah bahwa komunikasi pembangunan tidak lagi memposisikan pemerintah lebih tinggi daripada rakyat yang hanya membentuk pola komunikasi *top-down*. Karena di negara dengan sistem politik terbuka seperti Indonesia, sesuai tuntutan dan cita-cita reformasi idealnya

pemerintah memandang rakyat dalam posisi setara. Dalam konteks ini teknologi informasi sumber terbuka (*open source*) dapat semakin mendorong keterbukaan, partisipasi, dan kesetaraan tersebut.

Dengan pola komunikasi tersebut maka proses pembangunan sejak perencanaan perlu melibatkan semua pihak baik obyek, pelaku, maupun fasilitator. Schramm *dalam* Harun dan Ardianto (2011) merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:

- a. Menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari atas ke bawah.
- c. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, mulai orang dewasa hingga anak-anak, sejak baca tulis hingga keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat.

Peran media massa dalam komunikasi pembangunan saat ini semakin berkembang dengan munculnya media baru. Menurut Leeuwis (2009) media baru cenderung mengkombinasikan properti fungsional media massa dan untuk komunikasi antarpersonal, dimana hal itu secara potensial dapat mencapai banyak orang di banyak lokasi yang berbeda, tetapi pada saat bersamaan mendukung tingkat antar-aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan media massa konvensional.

Menurut Amien (2005) bergesernya cara kita mempersepsi semesta membuat konsepsi

pembangunan mengalami pergeseran yang berarti. Pembangunan yang dulunya merupakan rangkaian program yang disusun secara komprehensif untuk mencapai sasaran atau tujuan yang terdefinisi dengan jelas, telah bergeser menjadi upaya-upaya untuk mempersiapkan tatanan menghadapi perubahan lingkungannya yang semakin dinamis demi untuk mempertahankan keberlangsungan keberadaannya.

Salah satunya adalah munculnya gerakan masyarakat desa untuk membangun dirinya sendiri menghadapi perubahan teknologi yang demikian pesat. Sementara itu konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah masih berjalan lambat dan berorientasi proyek. Akibatnya terjadi jurang informasi yang semakin yang memposisikan kawasan pedesaan semakin marjinal dalam hal akses terhadap teknologi komunikasi. Berdasarkan hal itu, penulis akan menganalisis bagaimana desa-desa dapat membangun dirinya sendiri melalui Gerakan Desa Membangun (GDM).

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui profil dan program Gerakan Desa Membangun (GDM).
2. Mengetahui paradigma pembangunan pedesaan berbasis TIK yang dijalankan GDM.
3. Mengetahui masalah dan strategi pengembangan TIK di pedesaan
4. Mengetahui contoh pengembangan media komunikasi pedesaan berbasis TIK.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam penelitian ini, dokumen yang dihimpun, dikumpulkan dan dianalisis adalah konten website GDM (<http://desamembangun.or.id/>) dan konten

website desa berbasis desa.id yang berafiliasi dan dikembangkan oleh GDM.

4. Pembahasan

4.1. Profil Gerakan Desa Membangun

4.1.1. Sejarah

Berdasarkan data profil website GDM (<http://desamembangun.or.id/siapa-kami/>) diperoleh data bahwa Gerakan Desa Membangun (GDM) tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Saat itu, Pemerintah Desa Melung dan Gedhe Foundation menyelenggarakan Lokakarya Desa Membangun (LDM). Lokakarya itu diikuti oleh Desa Melung, Desa Karangnangka, Desa Kutaliman, Dawuhan Wetan (Kedungbanteng, Banyumas) dan Desa Mandalamekar (Jatiwaras, Tasikmalaya).

LDM bertujuan untuk berbagi pengalaman dari desa-desa dalam tata kelola sumber daya desa. Desa Mandalamekar diundang secara khusus karena dinilai berhasil dalam menerapkan strategi baru tata kelola sumber daya desa, seperti pertanian, hutan desa, dan konservasi sumber mata air secara mandiri sehingga menyabet penghargaan dalam bidang konservasi alam.

Semangat itu menginspirasi desa-desa di Banyumas untuk melakukan gerakan secara kolektif, maka lahirlah Gerakan Desa Membangun (GDM). GDM merupakan inisiatif kolektif desa-desa untuk mengelola sumber daya desa dan tata pemerintahan yang baik. Gerakan ini lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung dari atas ke bawah (*top down*) dibanding dari bawah ke atas (*bottom up*). Akibatnya, desa sekadar menjadi objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan. Desa tidak kurang diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya.

Bagi GDM, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan desa atau nama lain yang artinya sama sebagai kesatuan wilayah hukum yang berhak mengatur rumah tangga sendiri. Strategi yang disepakati adalah menunjukkan prestasi dan praktik baik pengelolaan desa, baik secara

administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan program pembangunan. Dengan kata lain, GDM menjadi jaringan kerja antardesa untuk berdaulat pada sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi.

4.1.2. Program kerja GDM

GDM menjalankan program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien.
- b. Pengembangan tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan
- c. Mengelola Sumber Daya Desa yang berkelanjutan dengan kearifan kolektif masyarakat desa
- d. Penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan berbasis sumber terbuka (*open source*)
- e. Perlindungan warga desa yang migrasi ke luar negeri atau buruh migran

4.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisai GDM berdasarkan akses konten website Selasa (11/10/2016) terdiri atas:

Dewan Pakar

Avi Mahaningtyas
Bayu Setyo Nugroho
Joko Waluyo
Soetardjo Ps
Sungging Septivianto

Juru Bicara

Yossy Suparyo

Dukungan TIK dan Pelatihan

M. Khayat
Soepriyanto
Pri Anton Subardio
Rahmad Hafidz
Pradna Paramitha
Tommy Destryanto
Ahmad Fadli

Sekretariat GDM

Perum Griya Satria Indah Sumampir
Jalan Opal Blok O No 9, Purwokerto
Banyumas, Jawa Tengah
Telepon: +62 813 2893 3355
E-mail: [desamembangun\[at\]gmail.com](mailto:desamembangun[at]gmail.com)
Twitter: @desamembangun
Website: <http://desamembangun.or.id>

4.2. Paradigma Pembangunan Pedesaan Berbasis TIK

Paradigma merupakan suatu yang penting menjadi dasar dalam upaya memahami secara mendalam masalah-masalah kehidupan yang dihadapi dan mengatasinya secara mendasar. Pada tahapan praktis tertentu, paradigma pembangunan juga dapat dipandang sebagai kesatuan teori, model, strategi dan sistem pengelolaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Nawawi, 2009).

Berbeda dengan konsep pembangunan tradisional yang umumnya menganalogikan masalah pembangunan dengan “keterbelakangan” (paradigma modernisasi) dan atau “ketergantungan” (pada paradigma dependensi), sains baru melihat masalah itu sebagai akibat dari adanya tatanan yang mengalami stagnasi dan atau terisolasi dari lingkungannya (Amien, 2005).

Kondisi itu sering dialami oleh desa yang mengalami stagnasi dalam pembangunan dan terisolasi dari pusat pembangunan. Dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah dan antara desa dan kota, perlu ada perubahan paradigma dalam melihat desa. Salah satunya menurut Zaini (2010) adalah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*base on village*).

Berkaitan dengan pengembangan infrastruktur TIK di pedesaan, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2013 tentang Desa (UU Desa) dijelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan akan menjadi salah satu prioritas dalam

pembangunan pedesaan. Misalnya dalam Pasal 86 UU Desa terdapat poin-poin berikut ini:

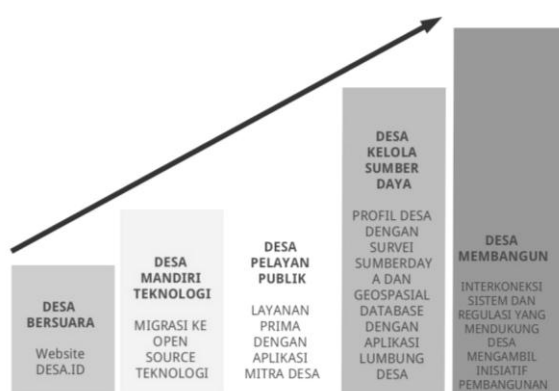
1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
3. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Pedesaan.
5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Paradigma pembangunan pedesaan berbasis internet penting dilakukan di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karena menurut (Amien 2005) kesediaan informasi merupakan “hak asasi” setiap komponen, karena pada dasarnya komponen tatanan membutuhkan informasi yang akurat serta tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat waktu demi untuk memilih tanggapan yang tepat demi untuk memilih mempertahankan keberlangsungan keberadaannya dan juga untuk meningkatkan kualitas partisipasinya dalam membangun tatanannya.

Berdasarkan hasil penelusuran sumber data yang penulis lakukan diperoleh informasi bahwa paradigma pembangunan pedesaan yang dibangun melalui GDM dilakukan dengan beberapa tahapan (Suparyo, 2013):

1. Mengembangkan jaringan informasi pedesaan berbasis internet dengan membangun website desa-desa dengan domain desa.id;

2. Mendorong desa mandiri teknologi dengan migrasi ke teknologi open source;
3. Meningkatkan pelayanan publik dengan aplikasi mitra desa;
4. Mengelola sumber daya berdasarkan profil desa dengan survei sumber daya dan data geospasial dengan aplikasi lumbung desa (lihat: mitra.or.id);
5. Membangun desa dengan interkoneksi sistem dan regulasi yang mendukung desa untuk mengambil inisiatif pembangunan.



Gambar 1. Tahapan pembangunan pedesaan GDM (Suparyo, 2013)

4.3. Masalah dan Strategi Pengembangan TIK di Pedesaan

GDM (2014) memetakan sejumlah permasalahan dan merumuskan langkah strategis penerapan TIK di pedesaan. Berikut ini adalah poin-poin penting yang berhasil dirumuskan oleh Gerakan Desa Membangun.

Tabel 1. Masalah dan strategi penerapan TIK di Pedesaan.

No	Masalah	Aktivitas
1	Informasi tentang desa kurang terpublikasi secara luas sehingga isu pedesaan masih terpinggirkan	<p>Untuk mendukung pengarusutamaan isu pedesaan maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan website di domain DESA.ID untuk mempertegas identitas desa di internet sesuai dengan kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. ▪ Pelatihan produksi konten

	an di ranah publik.	<p>website (teks, foto, video) yang bermaterikan dunia perdesaan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan mengunggah konten (posting) di website desa. ▪ Pelatihan strategi menyebarluaskan konten desa melalui media sosial (khususnya Facebook, Twitter, dan Google+). ▪ Pembuatan modul dan video tutorial pengelolaan website desa dan media sosial. ▪ Pembuatan web sindikasi dan agregasi untuk konten antardesa. ▪ Membangun komunikasi antara desa dan media arus utama sehingga materi website desa dapat menjadi rujukan pemberitaan media massa, akibatnya isu-isu desa makin tersebar luas (amplified).
2	Potensi maupun produk unggulan desa tidak terpromosikan dengan maksimal sehingga potensi dan produk desa belum dikenal oleh masyarakat luas.	<p>Untuk mendorong promosi potensi dan produk unggulan desa maka dilakukan beberapa aktivitas berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menginventarisasi potensi maupun produk unggulan di desa. ▪ Pelatihan untuk mengemas informasi (advertorial) dan pencitraan visual atas setiap potensi maupun produk unggulan desa. ▪ Pelatihan video singkat yang menceritakan potensi desa maupun testimoni pihak ketiga. ▪ Pelatihan strategi promosi potensi dan produk unggulan melalui internet.
3	Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa menyangkut tata kelola sumber daya desa	<p>Untuk mendukung kebijakan pemerintah desa yang mengatur tata kelola sumber daya desa maka dilakukan beberapa aktivitas berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemetaan sumberdaya desa berupa data dasar kependudukan (individu dan keluarga), peristiwa, dan wilayah yang menghasilkan

	masih sangat minim serta belum didukung basis data yang akurat dan lengkap.	<p>dokumen profil desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan aplikasi pendukung Sistem Informasi Desa ▪ Pelatihan pemanfaatan sistem informasi desa, termasuk cara/teknik menganalisis data yang dihasilkan oleh sistem. ▪ Pelatihan pembuatan peraturan desa (Perdes) dan SK Kades yang mengatur tata kelola sumber daya desa.
4	Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa masih lambat karena layanan dilakukan secara manual.	<p>Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa maka dilakukan aktivitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendata dan mengevaluasi jenis-jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. ▪ Pelatihan membuat standar prosedur operasional (SOP) pelayanan publik di desa sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. ▪ Pelatihan pemanfaatan fitur tata administrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Desa untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat.
5	Pemerintah desa belum mampu menerapkan keterbukaan informasi publik.	<p>Untuk mendukung keterbukaan informasi publik di desa maka dilakukan aktivitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan keterbukaan informasi publik di desa mengacu pada UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa ▪ Pelatihan membuat standar prosedur operasional (SOP) penyediaan informasi dan pelayanan permintaan informasi oleh publik di desa sesuai UU No 14 tahun 2008 dan UU No 6 tahun 2014. ▪ Pelatihan memanfaatkan Sistem Informasi Desa untuk penyediaan dan pelayanan informasi, seperti rencana, pelaksanaan,

		pelaporan pembangunan desa.
6	Kapasitas masyarakat desa dalam memantau maupun meminta informasi atas rencana dan pelaksanaan pembangunan desa masih rendah	<p>Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemantauan pembangunan maka dilakukan kapasitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi Sistem Informasi Desa kepada masyarakat desa melalui pelbagai media, seperti pertemuan, stiker, spanduk, dan media lainnya. ▪ Pelatihan mengakses dan berinteraksi dalam Sistem Informasi Desa untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan masyarakat. ▪ Pelatihan warga untuk mengajukan permintaan informasi pada pemerintah desa.
7	Akses internet di wilayah perdesaan masih sulit dan jika ada akses kualitasnya sangat rendah.	<p>Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan aktivitas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan penguat sinyal seluler di desa. ▪ Membangun kerjasama dengan penyedia jasa internet (ISP) lokal untuk akses internet di desa. ▪ Pengembangan aplikasi/sistem yang mampu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berjalan pada akses internet bandwidth rendah dan smartphone; 2. Tampilan responsif menyesuaikan teknologi yang digunakan (desktop dan mobile); 3. Aplikasi yang bisa dijalankan dalam jaringan lokal (localhost); 4. Aplikasi berjalan lintas platform sehingga tidak tergantung pada sistem operasi tertentu. ▪ Pembuatan modul dan video tutorial penggunaan aplikasi pada perangkat desktop dan mobile

Sumber: GDM (2014)

4.4. Pengembangan Media Komunikasi Pedesaan Berbasis TIK

4.4.1. Desa Melung (<http://melung.desa.id>)

Desa Melung berada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa berjarak sekitar 20 kilometer dari jantung ibukota Kabupaten Banyumas ini sohor dengan julukan “desa-Internet”, desa yang melek teknologi informasi. Pembangunan infrastruktur internet di Desa Melung atas inisiatif masyarakat sendiri. Dimotori oleh Kepala Desa yang menyisihkan kas Desa untuk untuk membangun jaringan Internet, saat ini hampir seluruh kawasan desa tersebut sudah terjangkau jaringan internet menggunakan wifi. Akses Internet memudahkan warga memperoleh dan saling berbagi informasi. Hampir setiap warga Melung memiliki akun Facebook dan Twiter. Desa Melung juga memiliki website www.melung.desa.id. Di Web ini, pemerintah desa dapat menuliskan seluruh informasi dan kegiatan yang berkaitan dengan Desa Melung (Viva.co.id, 23 Juli 2013a).

Pengelolaan sistem teknologi informasi di Desa Melung dibagi menjadi dua:

1. Pengelolaan jaringan Internet menggunakan akses Wi-Fi. Termasuk penggunaan software berbasis open source seperti Linux, Ubuntu, dan sistem operasi lokal, BlankOn Banyumas, yang memakai Bahasa Jawa Banyumas. Ini diciptakan agar warga yang tidak bisa berbahasa Indonesia tetap bisa membuat berita atau kabar dengan Bahasa Banyumasan untuk di-update ke situs Melung. Selain mudah diaplikasikan dan gratis, penggunaan sistem operasi open source relatif lebih aman dari ancaman virus.
2. Pengelolaan website Desa Melung. Pembagian tugasnya meliputi berbagai hal terkait pengelolaan data--mulai dari data kependudukan, data potensi sumber daya alam, beragam peristiwa di desa, serta beragam informasi kegiatan desa. Tujuannya supaya pengunjung website bisa mengetahui potensi Desa Melung seperti pertanian, peternakan, dan seni budaya. Bahkan

terdapat daftar warga yang menjadi TKI di luar negeri, sehingga bisa dikontrol untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan.

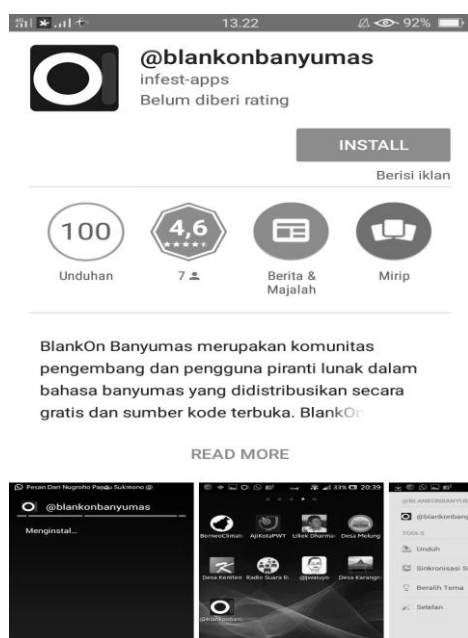
Desa Melung saat ini menjadi inspirasi sekaligus “sekolah” bagi desa-desa lain, di dalam maupun luar Kabupaten Banyumas. Program Internet Melung menjadi embrio lahirnya GDM. Ini sebuah gerakan yang dilandasi semangat membangun desa dengan berbasiskan Internet dan teknologi informasi, secara mandiri dan swadaya. Gerakan ini mencakupi sejumlah kegiatan mendasar, seperti membangun jaringan Internet, menggunakan sistem open source pada perangkat komputer, serta membuat website gratis. Kegiatan ini merupakan gerakan swadaya masyarakat, tanpa harus menggunakan anggaran pemerintah yang terkadang hanya berorientasi proyek, sementara program yang dijalankan nyaris tidak ada (Viva.co.id, 23 Juli 2013a).

Berikut ini tampilan website Desa Melung berdasarkan penelusuran penulis tanggal 11 Oktober 2016:



Gambar 2. Tampilan website Desa Melung

Selain melalui website, Desa Melung juga dapat diakses di *smartphone* Android melalui aplikasi @blankonbanyumas. Penggunaan aplikasi Android ini akan memudahkan pengguna yang ingin mengetahui informasi desa melalui *smartphone*.



Gambar 3. Tampilan aplikasi Android @blankonbanyumas (11 Oktober 2016)

Salah satu daya tarik website Desa Melung, selain menampilkan profil dan berita desa, website tersebut juga melalui <http://melung.desa.id/shop/> menerapkan *e-commerce*. Terdapat beragam produk unggulan yang dijual dan semuanya merupakan hasil bumi dan produksi masyarakat desa tersebut seperti: bibit tanaman, hasil pertanian, madu, makanan ringan dan hasil kerajinan.

4.4.1. Desa Ciburial (<https://ciburial.desa.id>)

Desa Ciburial berada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengembangan internet di desa tersebut dilakukan Kepala Desa Imam Soetanto. Di desa tersebut banyak obyek wisata tapi kurang promosi. Lalu dibuatlah situs resmi ciburial.desa.id. Situs itu akhirnya tidak hanya sebagai tempat informasi, tapi juga pusat interaksi antara perangkat desa dengan warga sekitar. Animo masyarakat sangat tinggi, sehingga banyak kritik dan saran yang masuk (Viva.co.id, 23 Juli 2013b).

Tak cuma situs web resmi, desanya juga menyediakan internet gratisan melalui Wifi. Dan warga pun berbondong-bondong ke balai desa, memanfaatkan akses tanpa bayar itu.

Semua pembiayaan dibayar dengan kas desa. Dampaknya, kunjungan wisatawan Ciburial terus bertambah. Tak hanya turis domestik, wisatawan asing pun banyak berkunjung ke desa ini. Mereka mengunjungi Gua Jepang dan Gua Belanda, ada juga yang hanya mencoba rute bersepeda.

Berdasarkan informasi di web Desa Ciburial, desa tersebut juga mencanangkan Program Desa Ciburial Go Open Source (CiGOS). Program CiGOS merupakan sebuah semangat gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Desa Ciburial. Pelaksanannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Masyarakat (TPM) dan Kelompok Masyarakat Informasi (KMI) Desa Ciburial. Tujuan Program CiGOS adalah:

- Ikut menyukseskan program Indonesia, Go Open Source (IGOS) yang merupakan semangat gerakan untuk mengurangi kesenjangan teknologi informasi antara negara berkembang dengan negara maju serta antar daerah.
- Meningkatkan kesadaran kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghargai atas hak kekayaan intelektual serta senantiasa menggunakan perangkat lunak yang legal.
- Mengenalkan sistem operasi Linux sebagai sistem operasi sumber bebas yang murah, mudah dan mempunyai kelebihan dibandingkan sistem operasi sumber tertutup yang berbayar.
- Mewujudkan Masyarakat Desa Ciburial yang melek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis OSS.
- Mewujudkan Desa Ciburial sebagai Cyber Village berbasis Kemandirian TIK.
- Terfasilitasinya kegiatan implementasi migrasi ke open source di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- Menjadikan Open Source sebagai solusi software yang mudah digunakan (Easy), aman (Safety), bebas (Free), dan Barokah (Halal).

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemdes Ciburial juga melaunching sekolah berbasis TIK. Sekolah tersebut dinamai Sekolah Demit (Desa Melek IT) Ciburial. Pada tanggal 21 April 2014, Desa Ciburial meraih anugerah Sabilulungan Award dalam Bidang TIK dari Bupati Bandung. Dalam waktu yang bersamaan pula, Desa Ciburial memperoleh kepercayaan untuk mengelola CSR berupa 26 unit personal computer (PC) ditambah 1 unit server dari Triparta.

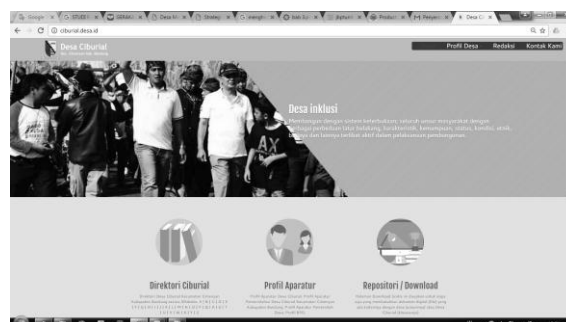
Komputer dan server tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan SDM Desa Ciburial berbasis TIK. Sasarannya adalah segenap masyarakat Desa Ciburial, khususnya usia didik (Kelas 4,5,6 Sekolah Dasar). Operasional Sekolah Demit Ciburial (SDC) selanjutnya akan dijalankan oleh Unit Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTIK) BUMDes Mitra Sejahtera Desa Ciburial.

Selain itu Desa Ciburial juga merencanakan pembangunan e-Desa, yaitu aplikasi Cloude Computing atau sistem Sewa, sehingga pemerintah desa/kantor desa tidak memerlukan server, perawatan dan tenaga ahli IT, yang memungkinkan proses administrasi (pembuatan surat-surat permohonan KTP, IMB, Domisili, Asal Usul, SKTM, numpang nikah dll) di Desa menjadi otomatis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang akurat, cepat, mudah dan murah. Keuntungan menggunakan e-Desa adalah:

- Web based sehingga sangat mudah di akses, pengguna hanya dengan menggunakan web browser sudah dapat memakai aplikasi.
- Mempermudah dalam pembuatan surat-surat, laporan, pengarsipan dokumen, monitor proses dan status pembuatan dokumen.
- Pembelian Software, Server berikut perlengkapan penunjang lainnya.
- Tidak perlu menyediakan ruang server khusus.
- Tidak perlu perawatan.
- Tidak perlu tenaga ahli IT.
- Mengurangi pemakaian kertas.

- Mengurangi pemakaian telepon karena komunikasi lewat aplikasi (Workflow atau e-mail).
- Mengurangi biaya Trasportasi untuk konsolidasi data dari Desa ke Kecamatan, ke Kabupaten/Kota atau ke Provinsi karena sudah terintegrasi.
- Pengoptimalan Sumber Daya Manusia, dimana dengan menggunakan Aplikasi ini SDM yang diperlukan tidak perlu banyak dan waktu untuk penyelesaian tugas menjadi lebih cepat, sehingga User/SDM yang ada dapat lebih fokus mengerjakan yang lain.
- Banyak template tersedia sudah siap pakai sehingga User tidak perlu mengetik ulang untuk pembuatan Surat atau Laporan atau User juga dapat membuat template sendiri.
- Mempermudah untuk pembuatan administrasi, surat-surat dan pembuatan laporan di Desa.
- Mudah mencari data-data dan surat-surat warga jika di perlukan sewaktu-waktu.
- Mempermudah pengarsipan dokumen karena dalam bentuk *soft copy* sehingga tidak perlu ruangan arsip khusus.

Berikut ini tampilan website Desa melung berdasarkan penelusuran penulis tanggal 11 Oktober 2016:



Gambar 4. Tampilan website Desa Ciburial

Desain dan *Content Management Sistem* (CMS) website Desa Ciburial sangat menarik menggunakan konsep modern. Dalam website tersebut terdapat banyak konten grafis animasi, merupakan suatu terobosan inovatif bagi website desa yang umumnya sederhana. Selain itu juga menyediakan repositori data yang memudahkan pengguna mengunduh berbagai

regulasi terkait dengan pembangunan yang dikeluarkan berbagai institusi tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa.

5. Kesimpulan dan Saran

Gerakan Desa Membangun (GDM) lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung *top down* dan menjadikan desa sekadar menjadi objek pembangunan. GDM merupakan jaringan kerja antardesa untuk berdaulat pada sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan teknologi. Dengan adanya gerakan ini desa-desa dapat mengelola sumber daya dan menjalankan tata pemerintahan yang baik. Strategi yang dilakukan adalah melakukan praktik pengelolaan desa yang baik, pada aspek administratif, pelayanan publik, dan pengelolaan program pembangunan.

Pembangunan pedesaan berbasis internet ini dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Diawali dengan pengembangan membangun website desa-desa dengan domain desa.id, migrasi ke teknologi open source, pengembangan aplikasi mitra desa, pengembangan aplikasi lumbung desa, hingga membangun interkoneksi desa-desa yang mendukung pengambilan inisiatif pembangunan

Ke depan inisiatif desa-desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh *stakeholders* terutama pemerintah, dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, LSM, dan, praktisi teknologi informasi sebagainya. Apalagi dengan adanya UU Desa maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik. Sehingga desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi.

Daftar Pustaka

Adisasmita R. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.

Amien AM. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta (ID): Gramedia.

Dilla S. 2007. *Komunikasi Pembangunan. Pendekatan Terpadu*. Bandung (ID): Simbiosis.

GDM (Gerakan Desa Membangun). (2014). *Permasalahan dan Langkah Strategis Penerapan TIK di Perdesaan*. Sumber: <http://desamembangun.or.id/2014/06/permasalahan-dan-langkah-strategis-penerapan-tik-di-perdesaan/> [Diakses 10 Oktober 2016]

Harun R, Ardianto E. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta (ID): Rajawali Press.

Leeuwis C. 2009. *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan*. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Nawawi, I. 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat*. Surabaya (ID): Putra Media Nusantara.

Sitompul, RF. 2009. *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*. Jakarta (ID): LIPI Press.

Suparyo, Y. (2013). *Presentasi Gerakan Desa Membangun*. Sumber: http://www.slideshare.net/yossy_suparyo/presentasi-gerakan-desa-membangun?redirected_from=save_on_embed [Diakses 10 Oktober 2016]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa

Viva.co.id, 23 Juli 2013a. *Melung Sebuah Desa Internet*. Sumber: <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/428560-melung--kisah-sebuah-desa-internet> [Diakses 10 Oktober 2016]

Viva.co.id, 23 Juli 2013b. *Menembus Jagat Maya dari Desa*. Sumber: <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/428521-menembus-jagat-maya-dari-desa> [Diakses 10 Oktober 2016]

Zaini AHF. 2010. *Pembangunan Pedesaan*. Sumber: http://www.kemenegpdt.go.id/uploads/artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf [Diakses 10 Oktober 2016]

Sumber Internet

<http://desamembangun.or.id/siapa-kami/>

[Diakses 10 Oktober 2106]

<http://melung.desa.id/> [Diakses 10 Oktober 216]

<http://melung.desa.id/shop/> [Diakses 10 Oktober 2016]

<https://ciburial.desa.id/> [Diakses 10 Oktober 2016]

<https://ciburial.desa.id/desa-ciburial-segera-launching-sekolah-demit/> [Diakses 10 Oktober 2016]

<https://ciburial.desa.id/membangun-e-desa/> [Diakses 10 Oktober 216]

<https://ciburial.desa.id/program-desa-ciburial-go-open-source-cigos/> [Diakses 10 Oktober 2016]